

PARTISIPASI POLITIK TUANKU TAREKAT SYATHARIYAH DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI PADANG PARIAMAN¹

Sadri Chaniago
Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Padang
Kampus Unand Limau Manis Padang
(*sadrichaniago@gmail.com*)

ABSTRAK

Makalah ini mendiskusikan partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah sebagai caleg, dan penyebab kekalahan mereka dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pembahasan makalah ini menunjukkan bahwa terdapat 5 orang tuanku tarekat Syathariyah yang menjadi caleg, hanya 1 orang yang terpilih. Dalam berkampanye, tuanku memanfaatkan jaringan sesama tarekat, unsur seperguruan, dan jamaah tarekat untuk mendulang suara. Penyebab utama kekalahan tuanku sebagai caleg adalah: belum didukung dan dipilih secara maksimal oleh kalangan tarekat. Hal ini adalah dampak dari pemahaman keterlibatan tuanku dalam politik praktis masih “tabu”, dan belum maksimalnya tuanku merangkul potensi politik jamaah tarekat Syathariyah. Kajian ini semakin menegaskan implikasi kepatuhan kepada guru tarekat dalam politik masih diperdebatkan. Kata Kunci : *Partisipasi politik, tuanku tarekat Syathariyah, pemilu.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Padang Pariaman merupakan kawasan yang banyak terdapat penganut tarekat Syathariyah.² Diperkirakan jumlah penganut tarekat Syathariyah di kawasan ini “melebihi 100,000 orang” (*Tempo*, 19 Januari 1980). Ditinjau dari jumlah komposisi penduduk, menurut Samad (Makmur, 2005) penganut tarekat Syathariyah sebagai tradisionalis Islam di Padang Pariaman diperkirakan dalam jumlah 50% dari keseluruhan penduduk kawasan ini. Sedangkan 30% lagi merupakan golongan Islam tradisional moderat, serta 20% sisanya dari golongan modernis Islam.

¹ Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional :“*Peran Ilmu Ilmu Sosial Dalam Pembangunan Indonesia*” FISIP Universitas Andalas, Padang, 16 Oktober 2014.

² Tarekat Syathariyah dikembangkan oleh Syekh Abdullah al-Syathar di India (w.890 H/1485 M) (Fathurahman, 2004:153-155). Tarekat Syathariyah merupakan salah satu tarekat terpenting dalam Islamisasi di dunia Melayu-Indonesia, yang dikembangkan oleh Syekh Abdurrauf al-Singkili (Fathurahman, 2004: 152-153), pada sekitar tahun 1661 M (Fathurrahman, 2003:34). Di Minangkabau (Sumatera Barat), tarekat Syathariyah dikembangkan oleh Syekh Burhanuddin pada akhir abad ke-17, dengan berpusat di Ulakan, Padang Pariaman (Fathurrahman, 2003:164).

Banyaknya penganut tarekat Syathariyah di Padang Pariaman dapat dimaklumi, karena *nagari* Ulakan di Kabupaten Padang Pariaman merupakan bekas “pusat pengembangan Islam dan tarekat Syathariyah pertama di Minangkabau (Sumatera Barat), yang dikembangkan oleh Syekh Burhanuddin Ulakan, murid dari Syekh Abdurrauf al-Sinkili” (Fathurrahman, 2004:165). Sehingga dengan demikian, tarekat Syathariyah telah menjadi tarekat yang paling awal berkembang, dan sangat mengakar pada sebagian masyarakat di Padang Pariaman. Tarekat Syathariyah juga pernah menjadi satu-satunya representasi Islam tradisional di Sumatera Barat sebelum kemunculan tarekat Naqshabandiyah sekitar tahun 1850 M (Fathurrahman, 2003:70-71).

Keberadaan pengikut tarekat Syathariyah masih dapat disaksikan dalam berbagai aspek kehidupan di Padang Pariaman. Dalam praktek keagamaan misalnya, mereka masih melaksanakan tradisi penetapan masuknya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri melalui metode “*maniliak bulan*”³ (*rukyyah*) (Malalak, 2009), tradisi menggunakan bahasa Arab dan memakai sorban serta tongkat dalam khutbah hari raya maupun khutbah Jumat (*Antara Sumbang*, 21 September 2009). Mereka juga masih mengamalkan tradisi *basapa*⁴ ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan (*Harian Singgalang*, 08 Februari 2009).

Semua aktifitas ibadah jemaah tarekat Syathariyah ini dipimpin oleh tuanku⁵, yaitu ulama tradisional tarekat Syathariyah dalam konteks lokal Padang Pariaman. Sebagaimana lazimnya tradisi dalam tarekat, tuanku merupakan tokoh yang memiliki “kedudukan yang penting” sebagai pemimpin kerohanian dalam tarekat Syathariyah (Atjeh, 1980:62). Mereka juga memainkan peranan penting dalam komunitas tarekat Syathariyah, sebagai tokoh yang dimuliakan dan menjadi panutan karena merupakan “pemimpin, sekaligus guru” (Dobbin, 1974:326).

³ Melihat *hilal* sebagai tanda masuknya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri dengan mata telanjang, tanpa menggunakan alat bantu seperti teropong yang moderen.

⁴ Tradisi menziarahi makam Syekh Burhanuddin setiap bulan *Syafar*. Selain untuk beribadah, *basapa* juga merupakan ajang berkumpulnya anggota tarekat Syathariyah dari seluruh Sumatera Barat dan wilayah lainnya di Indonesia untuk membicarakan segala sesuatu tentang tarekat Syathariyah.

⁵ *Tuanku* ialah ulama tradisional di Padang Pariaman Sumatera Barat, yang menamatkan pengajiannya di pondok pesantren tradisional/surau (*Salafiyah*). Ia merupakan pemimpin dan guru dalam tarekat Syathariyah.

Mereka sangat dihormati, petuahnya didengar, tingkah lakunya diikuti, berfungsi sebagai penerang di dunia dan akhirat, dan selalu dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan (Pramono dan Bahren, 2009:105).

Walaupun berbagai kalangan beranggapan bahwa kaum tarekat⁶ merupakan kelompok yang *zuhud* dan cenderung menjauhi kehidupan dunia, namun di Padang Pariaman tuanku tarekat Syathariyah cenderung menafikan anggapan di atas. Keterlibatan tuanku tarekat Syathariyah dalam politik praktis, diantaranya dapat dilihat dari fenomena tuanku yang memainkan peranan sebagai pengurus partai politik, dan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada pemilu legislatif tahun 2009. Di antara mereka ini misalnya: Rahmat Tuanku Sulaiman, Saamar Tuanku Sidi (Partai Golkar), Ali Basyar Tuanku Sutan Sinaro, Zulhelmi Tuanku Sidi, Amirudin Tuanku Majo Lelo (Partai Kebangkitan Bangsa).

Namun demikian, hanya Zulhelmi Tuanku Sidi yang berhasil memenangkan pemilu. Zulhelmi Tuanku Sidi merupakan satu-satunya di antara 35 orang anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk periode jabatan 2009-2014 (Nurza, 2009), yang berasal dari kalangan tuanku dan jemaah tarekat Syathariyah di Padang Pariaman. Secara umum tuanku tarekat Syathariyah yang bertarung sebagai caleg pada pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Padang Pariaman mengalami kekalahan. Fenomena ini suatu “ironi” apabila dihubungkan dengan jumlah tuanku dan jemaah tarekat Syathariyah yang mayoritas di Padang Pariaman.⁷ Secara *das sein*, para tuanku yang berkompetisi tersebut akan berhasil, karena hampir dapat dipastikan jemaah tarekat Syathariyah akan memilih mereka, karena “pandangan dan sikap politik tuanku sebagai guru tarekat secara langsung maupun tidak langsung akan memiliki dampak terhadap pandangan, sikap dan

⁶ Tarekat dalam Islam cenderung dimaknai sebagai cara hidup atau jalan mistik-walau bagaimanapun bentuk dan ajaran yang mendasarinya- menitik-beratkan kepada upaya setiap diri manusia untuk mengembangkan potensinya sehingga mencapai tahap kesempurnaan (*insan kamil*), dan cenderung mengabaikan dunia (Thohir & Riyadi, 2002:13).

⁷ Diperkirakan jumlah penganut tarekat Syathariyah di kawasan ini “melebihi 100,000 orang” (*Tempo*, 19 Januari 1980). Menurut Samad (Makmur, 2005) penganut tarekat Syathariyah (sebagai tradisional Islam) di Padang Pariaman diperkirakan dalam jumlah 50% dari keseluruhan penduduk kawasan ini. Sedangkan 30% lagi merupakan golongan Islam tradisional moderat, serta 20% sisanya dari golongan modernis Islam.

partisipasi politik komunitas tarekat” (Tohri, 2006). Kedudukannya sebagai pemimpin dan guru dalam tarekat Syathariyah, pilihan politik tuanku akan diikuti jemaah tarekat Syathariyah, karena suara (pendapat) tuanku tersebut “didengar”, tingkah lakunya diikuti dan dijadikan rujukan oleh jemaah tarekat dalam pengambilan keputusan mengenai masalah sosial dan politik (Pramono dan Bahren, 2009:105). Pada dasarnya guru tarekat lazim menikmati kesetiaan yang penuh dari jemaah tarekat, yang cenderung lebih kuat dari pada yang dinikmati para ulama *non* tarekat (Bruinessen, 1996). Oleh karena itu, makalah ini akan: *pertama*, mengidentifikasi partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah sebagai caleg pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 di Padang Pariaman. *Kedua*, mengidentifikasi faktor penyebab kekalahan tuanku tarekat Syathariyah sebagai caleg dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Padang Pariaman tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tarekat, peranan guru sangat penting, sehingga terdapat suatu “doktrin ketaatan atau kepatuhan kepada guru (Abu Yazid al-Busthami dalam LIMTI, 1985). Doktrin ini bersandarkan kepada dalil dalil: (1). *Man laa Syaikhun Mursyidun lahu fa Mursyiduhu asy-Syaithaan* (Siapa yang tidak memiliki guru yang ber-derjat Mursyid, maka ia dibimbing oleh syetan). (2). Hadits Nabi : *Kun ma'a'I-Laah fa in lam takun ma'a 'I-Laah fa kun ma'a man ma'a 'I-Laah fa innahu yuushiluka ilaa 'I-Laah* (Hendaklah kamu selalu beserta Allah, jika tidak dapat demikian besertalah dengan orang yang dekat dengan Allah, ia akan membimbingmu ke jalan Allah). (3). *Al-Quran* : “Siapa yang disesatkan oleh Allah ia tidak akan memperoleh '*Waliyyam Mursyida*' (pembimbing kerohanian) (Q.S. Al-Kahfi 17). (4). “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah *Al-Wasilah* (berfungsi sebagai pembimbing, bukan perantara), bersungguh-sungguhlah di jalan itu mudah-mudahan kamu berhasil” (Q.S. Al-Maidah 35).

Doktrin ketaatan atau kepatuhan kepada guru dalam tradisi tarekat ini, telah membuat ulama tarekat menikmati kesetiaan penuh dari pengikutnya, lebih kuat dari yang dinikmati oleh ulama umumnya (Bruinessen, 1996:26). Walaupun

demikian, implikasi doktrin ketaatan / kepatuhan kepada guru ini dalam politik praktis masih diperdebatkan. *Pertama*, kalangan yang meyakini pandangan dan sikap politik guru tarekat secara langsung / tidak langsung berimplikasi terhadap pandangan, sikap dan partisipasi politik komunitas tarekat (Tohri, 2006). Posisi guru tarekat sebagai pemimpin tertinggi setiap komunitas dan pondok pesantren – dalam masyarakat yang masih tradisional dan kuat paternalistiknya- memainkan fungsi strategis membentuk pola pikir, cara pandang dan sikap / perilaku komunitas tarekat dalam berbagai aspek kehidupan.

Pandangan, sikap dan partisipasi politik komunitas tarekat merupakan refleksi dari pandangan dan sikap politik guru tarekat itu sendiri. Pandangan dan sikap politik ulama tarekat secara langsung / tidak langsung memiliki implikasi terhadap pandangan dan sikap dan serta partisipasi politik anggota tarekat. Pandangan, sikap, dan partisipasi politik anggota jemaah tarekat merupakan refleksi dari pandangan dan sikap politik ulama tarekat sendiri. Sebagian besar anggota tarekat terlihat mematuhi harapan, himbauan serta ajakan gurunya memilih calon tertentu pada pemilu. Namun demikian, sebagian kecil anggota tarekat yang tidak mengikuti keinginan gurunya secara diam diam, karena apabila ada perilaku dan pilihan politik ulama tarekat yang bertentangan dengan doktrin, sistem nilai dan ajaran-ajaran moral tarekat (Tohri, 2006).

Pendapat *kedua*, menyatakan pengaruh guru tarekat dalam aspek politik tidak sekuat dalam aspek sosial dan kemasyarakatan. Pengaruh itu juga dapat menjadi tidak bermakna ketika otoritas guru tarekat dianggap menyimpang dari hal yang seharusnya (Turmudi, 2003). Pengikut mempunyai alasan menentang legitimasi keputusan guru tarekat, khususnya dalam isu isu sosial dan politik. Beberapa kasus bahkan menunjukkan sang guru tarekat ditinggalkan oleh sejumlah besar pengikut karena pendirian dan haluan politiknya.

Berkurangnya pengaruh guru tarekat terhadap pengikut tarekat merupakan dampak hegemoni pemerintah Orde Baru yang sangat berkuasa, yang tidak hanya mengakibatkan terjadinya perbedaan orientasi politik kaum tarekat, melainkan juga berpengaruh terhadap substansi ajaran tarekat, yaitu pemutusan hubungan *bai'at* murid terhadap *mursyid*-nya (Sujuthi, 2001). Sebagai konsekuensinya,

perilaku politik murid tarekat tidak sama lagi dengan perilaku *mursyid*-nya. Afiliasi politik murid tarekat tidak mesti sama dengan afiliasi politik *mursyid*-nya, meskipun mereka masih dalam satu payung tarekat yang sama. Kecenderungan ini terjadi karena berhasilnya pemerintah Orde Baru mengembangkan ideologi politik Islam, yang memisahkan pemahaman agama dan politik. Sebagai akibatnya, kepemimpinan guru tarekat semakin bersifat *monomorphic*, hanya membatasi diri dalam bidang agama (Sunyoto dalam Sujuthi, 2001).

Pemerintah orde baru telah melakukan “depolitisasi Islam”, praktek tarekat harus dipisahkan dengan pilihan politik, karena pemilu adalah hak pribadi warga negara untuk menentukan pilihan politiknya, tidak memiliki kaitan dengan praktek agama (Pababbari, 2010). Dalam menentukan sikap politiknya, anggota jemaah tarekat cenderung berpendapat bahwa hak menentukan pilihan politik bukan kewajiban agama. Dengan kenyataan ini, maka dapat saja terjadi perbedaan sikap politik antara guru tarekat dengan para jemaah dalam afiliasi politik. Dalam menentukan pilihan politiknya, jemaah tarekat terlihat bersikap rasional, yang disebabkan oleh kondisi politik di era reformasi membuka ruang lebar dalam hal partisipasi politik rakyat. Namun demikian, kerasionalan jemaah tarekat tidak tertutup kemungkinan juga disebabkan oleh karena terjadinya praktek *money politic* dalam pemberian suara, karena rentannya persoalan sosial dan ekonomi yang dialami oleh kebanyakan umat Islam. Ikatan emosional yang merupakan basis solidaritas sosial penganut tarekat juga terlihat mulai melemah ketika tarekat telah dimasuki oleh kepentingan politik. Hal ini terjadi disebabkan oleh karena pertimbangan politik lebih didasarkan kepada hal-hal yang lebih pragmatis-rasional, sehingga ummat (jemaah tarekat) sebagai kesatuan sosial mencair bersamaan dengan semakin pudarnya ikatan emosional keagamaan, karena konsep politik yang secara ketat diturunkan dari konsep keagamaan (tidak ada pemisahan antara agama dan politik) kini mulai bergeser dengan dasar-dasar pertimbangan yang lebih rasional oleh berbagai kepentingan sosial dan ekonomi (Pababbari, 2010).

METODOLOGI

Makalah ini dihasilkan melalui *field research*, dengan paradigma dan pendekatan kualitatif (Creswell, 2003:1 ; Mack *et.al*, 2005:1). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, *indepth interview*, observasi (Fraenkel & Wallen seperti diikuti Creswel, 2003:18 ; Marshal & Rossman, seperti dirujuk Creswell, 2003:18 ; Bungin, 2003:45).

Wawancara dilakukan dengan tuanku tarekat Syathariyah yang menjadi caleg pada pemilu legislatif tahun 2009 di Padang Pariaman sebagai informan utama, dan informan triangulasi (*cross check*) (Kanto, 2003:59), yang terdiri dari tuanku dan *non* tuanku, yang terpilih secara *snow ball sampling / chain referral* (Chua Yan Piaw, 2006:202 ; Mack *et.al*, 2005:5 ; Kanto, 2003:53).

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif (Bungin, 2003:83, 95-96 ; Faisal 2003:70). Keabsahan data diukur dari “keterpercayaan” (*trustworthiness*), dan “keaslian” (*authenticity*) (Salim, 2001:78 ; Kanto, 2003:59 ; Creswell, 2002:7,161-162 ; Salim, 2001:99 ; Chua Yan Piaw, 2006: 10, 218; Aziz S.R dalam Bungin, 2003:59-60).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah sebagai caleg pada pemilihan umum legislatif tahun 2009 di Padang Pariaman menunjukkan peningkatan jumlah yang cukup signifikan, terdapat 5 orang tuanku tarekat Syathariyah yang berkompetisi sebagai caleg. Hal ini cenderung berbeda dengan pemilu legislatif 2004, di mana hanya ada satu atau dua orang tuanku tarekat Syathariyah yang “berani” menjadi caleg. Kecenderungan terjadinya peningkatan tuanku tarekat Syathariyah sebagai caleg dalam pemilu legislatif 2009 merupakan fenomena yang menarik, karena tuanku tarekat Syathariyah sudah mulai berani “keluar dari tradisi” mereka, tidak lagi semata mata berpartisipasi dalam urusan pendidikan di pondok pesantren dan bidang keagamaan, akan tetapi mulai melebarkan sayap ke dunia politik praktis.

Tabel 1 : Tuanku tarekat Syathariyah yang menjadi caleg pada pemilu 2009

LAMBANG	PARTAI	NAMA CALEG	JUMLAH
	Partai Kebangkitan Bangsa	1. Ali Basar Tuanku Sutan Sinaro 2. Zulhelmi Tuanku Sidi 3. Amirudin Tuanku Majo Lelo	3
	Partai GOLKAR	1. Rahmat Tuanku Sulaiman 2. Saamar Tuanku Sidi	2
Jumlah			5

Sumber: Data primer penelitian

Di antara tuanku tarekat Syathariyah yang menjadi caleg pemilu legislatif tahun 2009, hanya Zuhelmi Tuanku Sidi yang berhasil memenangkan pemilu, sehingga merupakan satu-satunya di antara 35 orang anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk periode jabatan 2009-2014 (Nurza, 2009), yang berasal dari kalangan tuanku tarekat Syathariyah di Padang Pariaman. Ini menunjukkan bahwa tuanku tarekat Syathariyah yang bertarung sebagai caleg pada pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Padang Pariaman, tidak berhasil dan dikalahkan dalam percaturan politik. Kekalahan tuanku tarekat Syathariyah pada pemilu legislatif ini merupakan suatu ironi, apabila dihubungkan dengan jumlah tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah yang mayoritas di Padang Pariaman.

Sepertinya sudah lazim, tuanku tarekat Syathariyah yang mencalonkan diri sebagai caleg cenderung memanfaatkan unsur sesama tarekat, yaitu : unsur satu perguruan (seperguruan), dan jamaah tarekat, melalui wirid wirid di mesjid dan surau untuk mendulang suara. Tuanku memiliki kecenderungan memanfaatkan jaringan seperguruan dan jamaah dalam berpolitik. *Modus operandi* yang digunakan adalah: melakukan pertemuan-pertemuan dalam wirid keagamaan, di mana tuanku yang mencalonkan diri diperkenalkan oleh tuanku lain kepada jamaahnya dalam wirid mingguan keagamaan di surau, di mana tuanku yang menjadi rekan dari tuanku yang mencalonkan diri merupakan penceramah tetap.

Terkadang tuanku yang mencalonkan diri dihadirkan dalam “silaturrahmi” dan mensosialisasikan diri kepada para jamaah wirid. Tuanku yang menjadi penceramah tetap pada wirid mingguan tersebut akan “menitipkan pesan” dan mengarahkan jamaah agar memilih tuanku yang mencalonkan diri tersebut. Namun dalam hal ini, tuanku tidak pernah memaksa dan mengharuskan jamaah memilih tuanku yang dipromosikan tersebut dalam pemilu, “tuanku hanya mengarahkan dan menegaskan saja kepada jamaah untuk memilih calon tersebut, tidak **“mewajibkan”** jamaah untuk mengikuti pilihan tuanku sebagai guru mereka.

Untuk lebih meyakinkan jamaah agar “mempertimbangkan” memilih tuanku yang menjadi caleg, maka tuanku yang menjadi penceramah akan memberikan gambaran perbandingan mengenai akibat yang muncul apabila memilih caleg yang memiliki dasar agama dan yang tidak. Tuanku memakai analogi “*mengadu ayam di gelanggang.*” Dari pada memenangkan “ayam” orang lain, maka lebih baik memenangkan “ayam” sendiri, yaitu tuanku yang menjadi caleg, yang berasal dari kalangan tarekat Syathariyah.

Sikap dan tanggapan jamaah terhadap ajakan tuanku untuk mendukung calon dari kalangan tuanku pada pemilu legislatif: *Pertama* mengikuti suruhan tersebut secara *taqlid*. Tipe jamaah yang bersifat *taqlid* ini adalah mereka yang kurang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai kehidupan politik praktis. Dalam prakteknya mereka akan bersifat patuh, menuruti suruhan tuanku memilih calon tertentu.

Kedua, tidak menuruti dan *taqlid* terhadap ajakan tuanku memilih calon tertentu. Tipe jamaah ini memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang dunia politik praktis. Mereka mempertimbangkan caleg yang disarankan, kemudian memutuskan mengikuti atau menolak caleg yang disarankan oleh tuanku. Apabila calon yang direkomendasikan oleh tuanku tersebut sesuai dengan pilihan hatinya, maka mereka memilih caleg tersebut. Apabila caleg tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan dan pilihannya, jamaah akan memiliki perbedaan pilihan politik dengan tuanku sang “gurunya” tersebut.

Perbedaan pilihan politik semakin diperkuat oleh faktor apabila adanya sanak saudara dari jamaah tersebut yang menjadi caleg di daerah pemilihan yang sama dengan tuanku yang direkomendasikan untuk dipilih. Apabila terjadi kasus seperti ini, maka anggota jamaah lebih cenderung memilih sanak saudaranya tersebut. Namun, jamaah tidak berani bersikap terbuka dan berterus terang mengenai keengganan mereka untuk memilih calon yang disarankan oleh tuanku tersebut.

Salah satu faktor yang teridentifikasi sebagai penyebab kekalahan yang dialami oleh para tuanku tarekat Syathariyah sebagai caleg dalam pemilu legislatif untuk DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2009, adalah kecenderungan belum didukung dan dipilihnya secara maksimal tuanku yang menjadi caleg oleh kalangan tuanku tarekat Syathariyah, maupun oleh jamaah tarekat Syathariyah. Belum didukung dan dipilihnya tuanku yang menjadi caleg ini pada dasarnya merupakan dampak dari tiga hal, yaitu:

Pertama, anggapan bahwa keterlibatan tuanku tarekat Syathariyah dalam dunia politik praktis merupakan “tabu”. Hal ini akibat “*bias*” dan kelirunya pemahaman terhadap politik praktis, sehingga ada kesimpulan: tuanku tidak perlu terlibat dalam politik praktis. Ada penolakan sebagian masyarakat terhadap keterlibatan tuanku dalam politik praktis. Masyarakat belum dapat menerima tuanku tarekat Syathariyah “sebagai institusi yang suci/sacral” melakukan partisipasi politik langsung sebagai caleg dalam pemilu, sehingga ada ungkapan: “*apabila tuanku berpolitik, maka akan kacaulah dunia.*”

Juga muncul anggapan yang kurang baik terhadap tuanku yang memasuki partai politik, yaitu sudah tidak bersih lagi dan telah tercemar. Di satu sisi, pada penolakan masyarakat terhadap partisipasi politik tuanku sebagai caleg dalam pemilu adalah untuk menjaga *murū’ah* tuanku. Apabila tuanku berpolitik, maka diyakini akan hilang *murū’ah* atau wibawanya. Masyarakat menginginkan tuanku tetap pada fungsinya: mengurus agama Islam, memenuhi berbagai keperluan keagamaan masyarakat (mengajarkan al-Qur’an, memberikan *tausiah*, mendoakan orang meninggal, dan sebagainya), tidak perlu mencampuri urusan politik dan pemerintahan.

Kecenderungan penolakan terhadap tuanku yang menggeluti politik praktis dengan menjadi caleg dalam pemilu, pada dasarnya merupakan dampak kekeliruan masyarakat memahami makna “politik”. Dari sisi “rasa masyarakat,” telah terlanjur memahami politik “negatif” dan “bias” sebagai hubungan konfrontasi dan koalisi, tipu daya (*fuda’ah*)⁸, penuh dusta, dipenuhi oleh perilaku politisi yang “tidak benar” (Samad, 2012).⁹

Padahal dalam konsep dasarnya, politik itu bersifat *siyasah*, walaupun juga bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, akan tetapi dalam bingkai akidah Islam dan akhlak mulia. Kecenderungan sebagian kalangan tuanku dan jemaah tarekat Syathariyah menolak kehadiran tuanku sebagai caleg pada pemilu, telah menimbulkan dampak kekalahan para tuanku yang mencalonkan diri pada pemilu legislatif (Samad, 2012).

Kedua, Belum maksimal merangkul potensi politik tuanku dan jemaah tarekat Syathariyah. Walaupun tuanku dan anggota tarekat Syathariyah mayoritas di Padang Pariaman, namun mereka bertebaran di berbagai partai dan belum dapat bersatu ke dalam suatu wadah, sehingga terkesan seperti terpecah-belah. Dalam konteks ini tarekat Syathariyah cenderung bersifat sebagai suatu *jama’ah*, yaitu kelompok massa yang tidak terorganisasikan dengan baik. Sedangkan pengaturan secara *jam’iyyah*-nya (organisasi) nyaris bisa dikatakan tidak ada.

Oleh karena tuanku belum mampu mempersatukan potensi, tidak mengherankan apabila tuanku tarekat Syathariyah yang menjadi caleg pada pemilu legislatif tidak didukung secara maksimal oleh kalangan tuanku sendiri dan jemaah tarekat Syathariyah. Kekalahan tuanku tarekat Syathariyah pada pemilu legislatif 2009 ini merupakan ironi, apabila dihubungkan dengan jumlah tuanku dan jemaah tarekat Syathariyah selama ini yang sering “mengklaim diri sebagai kekuatan mayoritas” di Padang Pariaman.

⁸ *Fuda’ah* merupakan praktek politik yang hanya bertujuan untuk pencapaian kekuasaan semata.

⁹ Pemahaman masyarakat ini tidak dapat disalahkan, karena disebabkan oleh perilaku politisi itu sendiri yang selama ini tidak memperlihatkan praktek politik *siyasah*, akan tetapi lebih kepada perilaku *fuda’ah*. Kelirunya pemahaman masyarakat ini juga merupakan sebagai indikasi kegagalan pemerintah dalam mendefinisikan politik kepada masyarakat. Oleh karena itu, menjelaskan kembali konsep yang sebenarnya dan mulianya tujuan berpolitik ini kepada masyarakat merupakan hal yang agak sulit untuk dilakukan (Samad, 2012)

Belum bersatu dan masih kurangnya kesadaran para tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah mengenai besarnya potensi politik yang mereka miliki telah membuat mereka belum memiliki *bargaining position* yang menentukan dalam dinamika politik lokal di Padang Pariaman. Sehingga dengan demikian, walaupun memiliki jumlah yang besar dan mayoritas, namun tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah selalu dimanfaatkan oleh kepentingan politik pada pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif (Presiden, Gubernur, dan Bupati). Tuanku tarekat Syathariyah yang yang ramai memiliki jamaah akan didekati oleh para kandidat, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan politik politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketika musim pemilu tiba, maka tuanku tarekat Syathariyah akan “dicari orang”.

Dalam kasus kajian ini, terlihat bahwa implikasi doktrin ketaatan / kepatuhan kepada guru dalam tarekat dalam politik praktis masih memiliki dua konsekuensi: antara efektif dan tidak. Walaupun tuanku tarekat Syathariyah cenderung memanfaatkan unsur sesama tarekat, yaitu: unsur satu perguruan (seperguruan), dan jamaah tarekat, melalui wirid wirid di mesjid dan surau untuk mendulang suara, ternyata hasilnya tidak bisa dipastikan efektif. Hal ini, semakin mempertegas pendapat bahwa implikasi doktrin ketaatan atau kepatuhan kepada guru ini dalam tradisi tarekat dalam dunia politik praktis masih diperdebatkan oleh para sarjana.

Dengan demikian, mengutip Pababbari (2010), afiliasi politik anggota jamaah tarekat (murid) sudah tidak lagi bergantung kepada pilihan politik guru tarekat. Hal ini terjadi karena berhasilnya pemerintah mengembangkan ideologi politik Islam yang memisahkan pemahaman agama dengan politik (Sunyoto dalam Sujuthi, 2001). Pemerintah orde baru telah melakukan “depolitisasi Islam”, dengan mengatakan bahwa praktek tarekat harus dibedakan dan dipisahkan dengan pilihan politik, karena pemilu adalah hak pribadi warga negara untuk menentukan pilihannya, tidak berkaitan dengan praktek agama

Sebagai akibat “depolitisasi Islam”, kepemimpinan guru tarekat semakin bersifat *monomorphic*, hanya memiliki dampak dalam bidang agama saja (Sunyoto, seperti dikutip Sujuthi, 2001). Ini juga semakin memperjelas bahwa

otoritas ulama tarekat memiliki keterbatasan legitimasi terhadap jemaah tarekat. Pengaruh ulama tarekat dalam aspek politik tidaklah sekuat dalam aspek sosial dan kemasyarakatan. Meskipun menjadi tokoh yang karismatik, hanya sedikit anggota jemaah tarekat yang terdorong untuk mengikuti langkah politik ulama tarekat. Perbedaan pilihan dan afiliasi politik (perilaku politik) ulama tarekat dengan anggota jemaah tarekat akhirnya menjadi fenomena biasa. Namun demikian, peranan ulama tarekat secara umum masih penting karena berada di garis terdepan dalam membimbing moralitas dan ortodoksi umat Islam (Turmudi 2003).

Temuan dalam penelitian ini juga mendukung Pababbari (2010), bahwa perilaku politik kaum tarekat di Indonesia akhir akhir ini menunjukkan gejala semakin melemahnya nilai-nilai tradisional agama Islam dalam kehidupan politik. Dalam menentukan sikap politiknya, jemaah tarekat cenderung berdasarkan pandangan bahwa hak menentukan pilihan partai politik bukan kewajiban agama. Dengan kenyataan ini, dapat saja terjadi perbedaan sikap politik guru tarekat dengan jemaah. Kajian ini menemukan terjadinya variasi di antara sikap teologis dengan kecenderungan afiliasi politik kaum tarekat. Jemaah tarekat terlihat memiliki kecenderungan untuk tidak mengikuti pilihan politik guru tarekat.

Dalam menentukan pilihan partai politiknya pada pemilu, jemaah tarekat terlihat bersikap rasional, karena kondisi politik di era reformasi membuka ruang lebar dalam partisipasi politik rakyat. Namun demikian, kerasionalan jemaah tarekat tidak tertutup kemungkinan juga disebabkan terjadinya praktek *money politic* dalam pemberian suara, karena rentannya persoalan sosial dan ekonomi yang dialami oleh kebanyakan umat Islam (Pababbari, 2010).

Ikatan emosional yang merupakan basis solidaritas sosial penganut tarekat juga terlihat mulai melemah ketika tarekat telah dimasuki oleh kepentingan politik. Hal ini terjadi karena pertimbangan politik lebih didasarkan kepada hal-hal yang lebih pragmatis-rasional, sehingga ummat (jemaah tarekat) sebagai kesatuan sosial mencair bersamaan dengan semakin pudarnya ikatan emosional keagamaan, konsep politik yang secara ketat diturunkan dari konsep keagamaan (tidak ada pemisahan antara agama dan politik) kini mulai bergeser dengan dasar-

dasar pertimbangan yang lebih rasional oleh berbagai kepentingan sosial dan ekonomi (Pababbari, 2010).

PENUTUP

Pada pemilu legislatif 2009 di Padang Pariaman, terjadi peningkatan jumlah para tuanku tarekat Syathariyah yang menjadi calon anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yaitu sebanyak 5 orang. Dari lima orang caleg tersebut, hanya Zulhelmi tuanku Sidi Saja yang berhasil memenangkan kompetisi, sedangkan empat (4) orang tuanku lainnya mengalami kekalahan. Para tuanku yang menjadi caleg ini cenderung memanfaatkan jaringan sesama tarekat, yaitu: unsur satu perguruan (seperguruan), dan jamaah tarekat, melalui wirid wirid di mesjid dan surau untuk mendulang suara. Juga terlihat fakta para tuanku ini kurang didukung dan diapresiasi oleh kalangan tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah sendiri.

Salah satu penyebab kekalahan tuanku tarekat syathariyah sebagai caleg pada pemilu legislatif 2009 di Padang Pariaman adalah: kecenderungan belum didukung dan dipilih oleh kalangan tuanku tarekat Syathariyah dan jamaah tarekat Syathariyah. Hal ini merupakan dampak dari: *Pertama*, anggapan sebagian kalangan tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah, bahwa keterlibatan tuanku tarekat Syathariyah dalam dunia politik praktis merupakan hal “tabu”. *Kedua*, belum maksimalnya upaya tuanku tarekat Syathariyah yang menjadi caleg dalam merangkul potensi politik tuanku dan jamaah tarekat Syathariyah.

Kekalahan tuanku tarekat Syathariyah sebagai caleg pada pemilu legislatif tahun 2009 di Padang Pariaman ini, terlihat semakin menegaskan bahwa konsep ataupun doktrin ketaatan serta kepatuhan kepada guru dalam konsep tarekat sehubungan dengan implikasinya dalam kehidupan politik praktis, terlihat masih memiliki dua konsekuensi: antara efektif dan tidak. Hal semakin mempertegas pendapat yang menjelaskan bahwa implikasi doktrin ketaatan atau kepatuhan kepada guru ini dalam tradisi tarekat dalam dunia politik praktis masih diperdebatkan oleh para sarjana.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara Sumbar. 2009. Imam jamaah Syattariyyah berkhotbah sambil pegang tongkat. 21 September. <http://www.antara-sumbar.com/id/?sumbar=berita&d=2&id=47841> (15 Mei 2010).
- Atjeh, Aboebakar. 1980. *Pengantar ilmu tarekat dan tasauf (huraian tentang mistik)*. Ipoh Perak: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.
- Bungin, Burhan. 2003. Teknik teknik analisis kualitatif dalam penelitian sosial. Dlm. Bungin, Burhan (pnyt). *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*, hlm. 83-105. Jakarta: PT. RajaGrafindo.ed.1.cet.1
- Bruinessen, Martin Van. 1992. *Tarekat dan politik: amalan untuk dunia atau akherat ? Majalah Pesantren* Vol. IX No.1 (3-14).
- Chua, Yan Piaw. 2006. *Kaedah penyelidikan*. Buku 1. Malaysia: Mcgraw-Hill Sdn.Bhd.
- Creswell, John.W. 2003. *Desain penelitian, pendekatan kualitatif & kuantitatif*. Terj. Jakarta: KIK Press.
- Dobbin, Christian. 1974. *Islamic revivalism in Minangkabau at the turn of the nineteenth century*. *Modern Asian Studies*, Vol.8. No.3. hal. 326. <http://www.jstor.org.stable/311737>.
- Faisal, Sanapiah. 2003. Pengumpulan dan analisis dalam penelitian kualitatif. Dlm. Bungin, Burhan (pnyt). *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*, hlm. 64-79. Jakarta: PT. RajaGrafindo.ed.1.cet.1
- Fathurrahman, Oman. 2003. *Tarekat Syattariyyah di Dunia Melayu: kajian atas dinamika dan perkembangannya melalui naskah naskah di Sumatera Barat*. Disertasi doktor ilmu pengetahuan budaya pada Program Studi Ilmu Susastra. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
-2004. *Tarekat Syattariyyah memperkuat ajaran neosufisme*. Dlm. Mulyati, Sri (pnyt), *Mengenal & memahami tarekat tarekat muktabarah di Indonesia*, hlm. 152-179. Jakarta: Kencana, ed.1, cet.1
- Harian Singgalang. 2009. Ulakan akan dibanjiri umat *basyafa*, berzikir, muliakan guru. 08 Februari.
- Mack. Natasha., Woodsong, Cynthia., Macqueen, Kathleen M., Guest, Greg & Namey, Emily. 2005. *Qualitative research methods: a data collector's field guide*. North Carolina: Family Health International.
- Malalak, Yurisman. 2009. Syattariyyah: lebaran, Senin atau Selasa. *Padang Ekspres*, 15 September.
- Nurza, Efa. 2009. KPU Padang Pariaman Tetapkan Dewan 2009-2014, *Harian Posmetro Padang*. 16 Juni.
- Pababbari, Musafir. 2010. Patronase Agama dalam kehidupan politik lokal (melemahnya nilai-nilai tradisional agama masyarakat). *Kertas Kerja, Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke – 10*. Hal. 583 - 600, Anjuran Kementerian Agama Republik Indonesia. Banjarmasin, 1-4 Nopember.

- Pramono & Bahren, 2009. *Kepemimpinan Islam di kalangan kaum tua dalam naskah-naskah tarekat Syattariyyah di Minangkabau*. Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7. No. 1 (91–108).
- Samad, Duski. 2002. Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau (*syarak mendaki adat menurun*), Jakarta: *The Minangkabau Foundation*. Cet. 1
-2003. Tradisionalisme Islam di tengah modernisme. Disertasi doktor pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sujuthi, Mahmud. 2001. *Politik tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Jombang, hubungan agama, negara dan masyarakat*. Yogyakarta: Galang Press.
- Tempo. 1980. Tarekat bukan Islam jama'ah. 19 Januari. Edisi 47/IX.
- Thohir, Ajid & Riyadi. Dedi Ahimsa. 2002. *Gerakan politik kaum tarekat, telaah historis gerakan politik antikolonialisme tarekat Qadiriyyah-Naqsabandiyah di pulau Jawa*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Tohri, Ahmad. 2006. Pandangan dan sikap politik Tuan Guru tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah dan implikasinya bagi partisipasi politik komunitas tarekat di Lombok, Tesis master (S2) Program Studi Magister Sosiologi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Turmudi, Endang. 2003. *Perselingkuhan kiai dan kekuasaan*. Yogyakarta: LKis.

Wawancara:

- Ahmad Zein *Tuanku* Sutan, wawancara pada hari Selasa, 4 Desember 2012 di Dusun Kampung Baru, Desa Koto Marapak, Kec. Pariaman Timur, Kota Pariaman.
- Ali Basar *Tuanku* Sutan Sinaro, wawancara pada hari Kamis, 6 Desember 2012 di Dusun Tarok, Desa Cubadak Mentawai, Kec. Pariaman Timur, Kota Pariaman.
- Bagindo Armaidi Tanjung, wawancara pada hari Sabtu, 8 Desember 2012 di Sekretariat Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pariaman, di Desa Manggung, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman.
- Suhaili *Tuanku* Mudo, wawancara pada hari Sabtu, 1 Desember 2012 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Batang Kapecong, Sarang Gagak Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman.
- Zulhelmi *Tuanku* Sidi, wawancara pada hari Kamis, 29 Nopember 2012 di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Batang Kapecong, Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman.
- Rahmat *Tuanku* Sulaiman, wawancara pada hari Minggu, 2 Desember 2012 di SD & SMP Model Internasional, Limpato, Kec. VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman.